

INDEKS PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA SMAN DAN SMKN DI KOTA MAKASSAR



Rosdiana*

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl. AP.Pettarani No. 72 Makassar Email: rosdianalitbang03@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan pendidikan agama pada Sekolah Menengah Atas di Kota Makassar? ". Berkaitan dengan hal tersebut, maka variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah sumber daya guru agama; Sumber daya pengawas pendidikan agama; Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan agama; Proses belajar mengajar pendidikan agama; Pelayanan sertifikasi guru pendidikan agama; dan kurikulum pendidikan agama di sekolah umum. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan survey. Obyek penelitian ini SMU/SMK Negeri di Kota Makassar dengan responden penelitian ini adalah kepala sekolah, guru agama, dan peserta didik. Data penelitian terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari isian angket (kuesioner) yang terkait dengan penerima dan pemberi layanan Pendidikan Agama di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan respon kepala sekolah terhadap pendidikan agama di sekolah menengah secara umum menunjukkan kategori cukup puas. Respon guru agama terhadap pendidikan agama di sekolah juga terkategori cukup puas. Respon dari peserta didik terhadap pendidikan agama serama umum terkategori puas. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari responden kepala sekolah, guru agama dan peserta didik terhadap pendidikan agama aspek sumber daya guru agama, pengawas guru agama, sertifikasi guru agama, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, dan kurikulum pendidikan agama secara umum terkategori cukup puas. Dari kategori nilai indeks kepuasan, terdapat rerata yang dianggap rendah yakni peran pengawas pendidikan agama dan sarana dan prasarana pendidikan agama

Kata Kunci:
*Indeks, Pelayanan,
Pendidikan Agama*

ABSTRACT

This study aims to determine the level of the Community Satisfaction Index (IKM) of religious education services in Senior High Schools in Makassar City? ". In this regard, the variables measured in this study are religious teacher resources; Supervision of religious education resources; Facilities and infrastructure related to religious education; The teaching and learning process of religious education; Religious education teacher certification services; and religious education curriculum in public schools. This research is a descriptive study using a survey approach. The object of this research is the Public High School / Vocational School in Makassar City with the respondents of this study are principals, religious teachers, and students. The research data consists of primary data and secondary data. Primary data is obtained from questionnaires (questionnaires) related to recipients and service providers of religious education in schools. The results of the study show that the principal's response to religious education in secondary schools generally shows that the category is quite satisfied. The response of religious teachers to religious education in schools is also categorized quite satisfied. The response from students to serama general religious education was categorized as satisfied. The Community Satisfaction Index (IKM) of principals, religious teachers and students on religious education aspects of religious teacher resources, religious teacher supervisors, religious teacher certification, facilities and infrastructure, teaching and learning processes, and religious education curriculum are generally categorized as quite satisfied . From the satisfaction index value category, there is a mean that is considered low, namely the role of religious education supervisors and religious education facilities and infrastructure

Keywords:
*Index, Service,
Religious Education.*

PENDAHULUAN

Penelitian terkait pendidikan agama yang diberikan kepada peserta didik oleh penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat tentang Indeks Pendidikan Agama di SMA (2016) menemukan secara nasional angka layanan pendidikan agama sebesar 0,81 (untuk semua agama) di sekolah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap tiga indikator utama atas ketersediaan layanan pendidikan agama belum penuh, yakni: guru agama, sarana belajar agama, dan proses belajar mengajar. Angka tersebut menurut penelitian ini belum mencakup kualitas atau mutu layanan pendidikan agama. Jika dijabarkan pada tiga indikator tersebut, maka faktor yang paling rendah adalah ketersediaan sarana pembelajaran. Faktor tersebut turut mempengaruhi keterpenuhan standar proses pembelajaran.

Pada beberapa sekolah, baik negeri maupun swasta, ketersediaan guru sudah cukup baik. Artinya, sudah terpenuhi berdasarkan siswa beragama, meskipun pada sekolah-sekolah lainnya masih belum terpenuhi. Keterpenuhan layanan pendidikan agama pada sekolah negeri lebih besar dibandingkan sekolah swasta. Ini menunjukkan perhatian pemerintah termasuk pemerintah daerah terhadap layanan pendidikan agama di sekolah negeri sudah cukup baik. Namun, masih kurang untuk sekolah swasta. (<http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/1637-Indeks-Pendidikan-Agama-di-SMA>)

Dari penelitian tersebut, faktor pelayanan kinerja (Performance) sekolah terutama pendidik (guru agama) yang memberikan layanan pendidikan agama dihubungkan dengan harapan peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama belum terukur secara jelas, untuk itu penelitian mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat Pendidikan Agama di sekolah umum yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Makassar ini sangat penting

dilakukan, hasil yang diharapkan adalah pihak Kementerian Agama dapat melihat bagaimana sekolah umum yang memberikan pelayanan Pendidikan agama dan bagaimana harapan peserta didik sebagai penerima atau yang merasakan langsung pelayanan pendidikan agama yang diberikan oleh sekolah, yang implikasinya juga berdampak pada bagaimana Kementerian Agama dapat meningkatkan kinerja mereka dalam bidang Pendidikan agama dan Keagamaan di sekolah umum.

Masalah penelitian: “Sejauh mana tingkat indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan pendidikan agama pada Sekolah Menengah Atas di kota Makassar?”

Permasalahan penelitian di atas, indikator utamanya adalah pelayanan publik, untuk itu dalam instrumen pengumpulan data ini menggunakan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Unit Pelaksana Instansi Pemerintah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan agama sebagaimana Permenpan no. 16 tahun 2016 yaitu: (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu Pelayanan; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Maklumat Pelayanan; (9) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Sedangkan bidang layanan pendidikan agama yang akan diukur berkaitan dengan enam hal yakni (1) Sumber daya guru agama; (2) sumber daya pengawas Pendidikan agama; (3) Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan agama; (4) Proses belajar mengajar Pendidikan agama; (5) Pelayanan sertifikasi guru Pendidikan agama; (6) Kurikulum pendidikan Agama di sekolah umum.

Tingkat indeks pelayanan pendidikan agama pada Sekolah Menengah Atas yang dilakukan dalam metode survey Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan sebagai acuan bagi Kementerian Agama baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pelayanan

Pendidikan agama di sekolah umum. Pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bidang Pendidikan agama dan keagamaan. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi lembaga unit teknis, terdiri dari: Direktur Pendidikan Agama Islam sebagai bahan untuk melakukan kebijakan terhadap program peningkatan mutu pendidikan agama ke depan. Kanwil Kementerian Agama sasaran penelitian yang hasilnya nantinya akan ditindak lanjuti berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan nantinya. Pusdiklat Teknis dan Balai Diklat Keagamaan melakukan program-program kediklatan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan Pendidikan agama di sekolah. Secara spesifik Kementerian agama akan mendapatkan masukan mengenai seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan untuk (1) Peningkatan sumber daya guru agama; (2) Peningkatan dan pengembangan sumber daya pengawas Pendidikan agama; (3) penyediaan Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan agama di sekolah Umum; (4) pelaksanaan proses belajar mengajar Pendidikan agama di sekolah umum; (5) Peningkatan profesional dan kualitas guru melalui sertifikasi guru Pendidikan agama di sekolah umum; (6) pengembangan Kurikulum pendidikan Agama di sekolah umum.

Kajian Pustaka

Pengertian Indeks

Pengertian Indeks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu penunjuk.

Indeks Pendidikan Agama merupakan data dan informasi tentang tingkat performance (kinerja) yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan agama, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Adapun tujuan indeks layanan publik sebagai pedoman penyusunan Indeks Layanan Pendidikan agama dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kinerja, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Manfaat data Indeks Pendidikan agama pada satuan pendidikan secara periodik, dapat diperoleh, sebagai berikut: 1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 2) Diketahui kinerja penyelenggaraan pendidikan agama yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik di bidang pendidikan secara periodik; 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan; 4) Diketahui indeks kinerja pendidikan agama secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup satuan pendidikan Atas (SMA); 5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup satuan pendidikan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan pendidikan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya kinerja serta layanan pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik, untuk konteks riset ini terkait layanan pendidikan agama. Penguatan pemberi pelayanan dibutuhkan untuk

menjamin pelayanan pendidikan kepada masyarakat, orangtua, dan murid disediakan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan tertentu yang diatur dalam peraturan perundangan.

Mutu layanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampainya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan (Tjiptono dan Diana, 2003). Ada tiga hal yang penting dalam proses pelayanan, yaitu mengenai pihak penyedia layanan, pihak yang menerima layanan dan bentuk layanan (Adya Brata, 2003:11), lebih lanjut dikemukakan bahwa untuk mengevaluasi layanan yang dikaitkan dengan harapan (*expectation*) dan kepuasan (*satisfaction*) (Adya Brata, 2003:38).

Pelayanan Publik

Martin & Kettner (Dwiyanto, 2002) mengidentifikasi dua pendekatan dasar yang biasa dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan publik, yakni: (1) pendekatan pengukuran dari kualitas kinerja pemberi layanan (*provider*), atau yang dikenal dengan *the outputs with quality dimensions approach*; dan (2) pendekatan kepuasan pelanggan/ masyarakat atau *the client satisfaction approach*. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya dibedakan oleh perbedaan fokus dan sumber data.

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan. Sementara itu, Sianipar (1998:5) mendefinisikan pelayanan sebagai cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan atau kebutuhan individu dan kelompok (*organisasi*). Pengertian ini senada dengan yang dikemukakan oleh Warella (1997) yang menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu

proses kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung atau suatu perbuatan yang melibatkan secara aktif penerima jasa pelayanan.

Dari beberapa definisi tersebut secara tersirat terdapat orang atau sekelompok orang yang memberikan pelayanan dan orang atau sekelompok orang yang menerima pelayanan. Hubungan antara keduanya bersifat timbal-balik, saling menguntungkan, dan saling membutuhkan. Artinya, bukan hanya konsumen yang diuntungkan dari adanya pelayanan, melainkan juga si pemberi pelayanan (*pelayan*) tersebut yang mendapatkan hasil/upah dari pelayanannya. Jika pelayanannya baik, konsumen akan semakin memberikan kepercayaan. Akan tetapi jika pelayanannya buruk, konsumen akan kehilangan kepercayaan dan akan meninggalkan pelayanan tersebut.

Hal yang dikemukakan oleh Rana (1999:21) bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya fungsi utama pemerintah adalah menyelenggarakan dan mendistribusikan fungsi pelayanan publik. Selanjutnya, baik atau buruknya pelayanan akan menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pelaksana pelayanan yang dilaksanakan oleh aparaturnya yang terlibat dalam menjalankan fungsi pelayanan umum.

Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa penjaminan mutu adalah wajib baik internal maupun eksternal.

Dalam menjamin mutu pendidikan sekolah merupakan jalur formal yang seluruh kegiatannya dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan bertingkat dimulai dari jenjang dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan formal ialah sekolah. disebut demikian karena proses belajarnya diadakan di tempat tertentu, yaitu

gedung sekolah, secara teratur dan sistematis dan berlangsung mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki kurikulum dan perencanaan yang sistematis memiliki fungsi, di antaranya: a) mendidik dan mengajar tingkah laku anak sebagai peserta didik, memperbaiki dan memperluas pengetahuan yang mereka miliki, dan mengembangkan bakat mereka, b) mengembangkan kepribadian peserta didik melalui kurikulum yang ada.

Sekolah dengan tugas sucinya melalui kurikulum, guru, sarana dan prasarana yang digunakan meneruskan pendidikan anak dari rumah mereka, untuk memberikan bimbingan dan pendidikan yang dibutuhkan. Sekolah memegang peran pendidikan dan persiapan serta pengarahannya.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Syafaruddin (2005:286) peningkatan kualitas organisasi sangat tergantung pada peran manajemen. Meskipun, manajemen hanya akan berfungsi dengan baik manakala dijalankan oleh para manajer dan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Manajemen yang difungsikan untuk mencapai tujuan sekolah disebut manajemen sekolah. manajemen sekolah ialah mengatur agar seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal dalam mendukung tujuan sekolah.

Selanjutnya menurut (Mukhtar dalam Kompri, 2015: 28) sekolah menjadi organisasi yang dirancang untuk dapat memberikan layanan dan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup peserta didiknya kelak. Dalam hal ini sekolah harus dapat dikelola dan diberdayakan agar mampu mewujudkan predikat sebagai sekolah yang berkualitas yang mampu memproses peserta didik yang pada akhirnya akan menghasilkan produk secara optimal.

Melalui penelitian indeks pendidikan agama pada sekolah Menengah Atas ini, diharapkan dapat dipetakan layanan pendidikan agama yang diterima siswa/siswi pada sekolah pada kabupaten-kota dan provinsi, hasilnya juga diharapkan dapat

digunakan untuk pendefinisian jenis intervensi program berdasarkan skala prioritasnya.

Menurut Alex R. Rodger, dalam Zulfah (2011:452-453) pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya. kesadaran tentang suatu agama dan pada gilirannya akan membentuk pribadi-pribadi ataupun komunitas yang mempunyai kesadaran religius. Jadi integral yang dimaksud adalah dasar pendidikan keagamaan Islam yang acuannya pada Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq. Ketiga hal tersebut dilaksanakan dengan utuh

Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa (Hasbullah, 2006:1).

Sementara agama memiliki kedudukan yang penting dalam pendidikan nasional. Dalam tujuan pendidikan nasional: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." (UU 20/2003, pasal 3).

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 37 ayat 1 dan 2 bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. "(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa, (d) matematika, (e) ilmu pengetahuan alam, (f) ilmu pengetahuan sosial, (g) seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan olah raga, (i) keterampilan/kejuruan, dan (j) muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa.”

Implementasi pendidikan agama pada satuan pendidikan setidaknya haruslah didasarkan pada standar yang telah ditetapkan yang oleh pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Standar tersebut merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional. Lingkup standar tersebut meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Fungsi dari standar tersebut adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan tentunya didasarkan pada standar proses pembelajaran. Menurut Thobroni pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari yang cenderung bersifat permanen dan mengubah perilaku. Pada proses tersebut terjadi penguatan informasi yang kemudian disimpan dalam memori dan organisasi kognitif. Selanjutnya, keterampilan tersebut diwujudkan secara praktis pada keaktifan siswa dalam merespons dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri siswa maupun lingkungannya (Thobroni, 2016:17).

Standar proses sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 19-24 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan kegiatan pendidikan.

Pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari pembaharuan dan pembangunan pendidikan nasional: “Pembaharuan sistem pendidikan nasional memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi: (1) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Kelembagaan pendidikan agama. Selain

pendidikan agama, di dalam sistem pendidikan nasional pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (UU 20/2003, pasal 30/2).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, karena hanya mengukur secara mandiri dimensi pelayanan pendidikan agama tanpa membandingkan masing-masing dimensi tersebut (Sugiyono, 2013:59), sedangkan dimensi yang dimaksudkan adalah indikator yang menjadi landasan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana yang tertuang dalam Permen PAN RB nomor 16 tahun 2014, sedangkan unsur yang akan diukur adalah beberapa hal yang berkaitan dengan Pendidikan Agama di sekolah umum.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan survey. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta faktual dan sifat-sifat populasi tertentu (Zuriah, 2005:14). Penelitian deskriptif dapat disebut juga penelitian eksploratif yaitu untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka variabel yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pendidikan agama yang berkaitan dengan enam hal yakni (1) Sumber daya guru agama; (2) sumber daya pengawas pendidikan agama; (3) Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan agama; (4) Proses belajar mengajar Pendidikan agama; (5) Pelayanan sertifikasi guru Pendidikan agama; (6) Kurikulum pendidikan Agama di sekolah umum

Obyek penelitian ini SMU/SMK Negeri di Kota Makassar dengan responden

penelitian ini adalah 35 kepala sekolah, 109 guru agama, dan 162 peserta didik.

Data penelitian terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari isian angket (kuesioner) dari informan yang terkait dengan penerima dan pemberi layanan Pendidikan Agama di sekolah, yakni Kepala sekolah, Peserta didik, Guru Agama. Data sekunder adalah data-data pendukung penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari informan, biasanya dalam bentuk dokumen-dokumen atau artikel-artikel yang terkait penelitian. Nilai IKM Pelayanan Pendidikan Agama dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Bobot penilaian dikategorikan pada lima tingkatan pada masing-masing yakin kategori tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas dan sangat puas.

PEMBAHASAN

Penilaian Kepala sekolah terhadap Pendidikan Agama

Responden kepala sekolah yang terjaring pada penelitian ini sebanyak 35 kepala sekolah, berdasarkan penilaian kepala sekolah tentang Pendidikan Agama di sekolah lihat tabel 1.

Tabel 1
Responden Kepala Sekolah SMAN/SMKN Kota Makassar

INDIKATOR	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU LAYANAN	BIAYA	SPEKIFIKASI LAYANAN	KOMP LAYANAN	PRILAKU LAYANAN	MAKLUMAT LAYANAN	SARAN	RATA:
KODE 01 SDM GURU AGAMA	1.77	2.29	1.26	1.69	1.77	2.57	2.74	2.11	1.44	1.96
KODE 02 PENGAWAS GURU AGAMA	2.00	2.29	2.06	1.69	1.77	2.34	2.66	2.11	1.44	2.04
KODE 03 SERTIFIKASI GURU AGAMA	2.97	2.77	2.43	2.06	1.77	2.57	2.74	2.11	1.44	2.32
KODE 04 SARANA DAN PRASARANA	2.26	2.49	2.44	1.49	1.77	2.57	2.74	2.11	1.44	2.15
KODE 05 PROSES BELAJAR MENGAJAR	1.77	2.29	1.00	1.49	1.77	2.57	2.74	2.11	1.44	1.91
KODE 06 KURIKULUM PA	2.83	3.29	2.66	1.49	1.77	2.46	2.74	2.11	1.44	2.31
RATA2	2.27	2.57	1.97	1.65	1.77	2.51	2.73	2.11	1.44	2.11

NO	NILAI INTERVAL	NILAI KONVERSI IKM	MUTU LAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00-1.75	25.00-43.75	D	TIDAK PUAS
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	KURANG PUAS
3	2.51-3.25	62.52-81.25	B	CUKUP PUAS
4	3.26-4.00	81.26-100	A	SANGAT PUAS

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa respon dari Kepala sekolah secara umum menunjukkan hasil yang terkategori *cukup puas*, dari tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa aspek perilaku layanan mendapatkan apresiasi yang *puas* dari kepala sekolah dengan nilai rerata 2.73. Perilaku layanan pendidikan agama pada sekolah adalah terkait layanan yang dilakukan oleh guru agama dan pengawas agama hal inilah yang diapresiasi *puas* oleh kepala sekolah.

Dan aspek ketersediaan media pengaduan saran dan masukan bagi pengembangan pendidikan agama pada Kementerian Agama merupakan aspek yang diresponi oleh responden kepala sekolah *kurang puas*. Ketersediaan aspek media ini sangat penting mengingat media ini dapat menjadi jembatan untuk menampung berbagai masukan dari berbagai pihak baik maun masyarakat secara umum. Saran perbaikan menjadi penanda bahwa pendidikan agama tidak saja menjadi tanggung jawab Kementerian Agama tetapi

berbagai kalangan dapat saja bertanggung jawab terhadap pendidikan agama terutama kalangan yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Penilaian Guru Agama Terhadap Pendidikan Agama

Responden Guru Agama yang terjaring sebanyak 109 responden, hasil penilaian guru agama tentang Pendidikan Agama di sekolah diperoleh rerata 2.21 dengan kategori *cukup puas*. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Penilaian Guru Agama SMAN/SMKN Kota Makassar

INDIKATOR	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU LAYANAN	BIAYA	SPESIFIKASI LAYANAN	KOMP LAYANAN	PRILAKU LAYANAN	MAKLUMAT LAYANAN	SARAN	RATA2	
KODE 01	SDM GURU AGAMA	3.19	2.79	1.78	1.75	2.36		2.05	1.79	2.24	
KODE 02	PENGAWAS GURU AGAMA	2.00	2.11	2.13	1.75	2.35	2.46	2.48	2.05	1.79	2.14
KODE 03	SERTIFIKASI GURU AGAMA	3.00	2.79	2.22	1.82	2.35	2.46		2.05	1.79	2.31
KODE 04	SARANA DAN PRASARANA	2.24	2.58	2.74	1.80	2.35	2.46		2.05	1.79	2.25
KODE 05	PROSES BELAJAR MENGAJAR								2.05	1.79	1.92
KODE 06	KURIKULUM PA	3.06	2.94	2.62	1.82	2.15	2.46	2.48	2.05	1.79	2.37
RATA2		2.70	2.64	2.34	1.79	2.31	2.46	2.48	2.05	1.79	2.21

Respon yang ditunjukkan oleh guru agama terkait keberadaan guru agama pada sekolah dalam hal persyaratan menjadi guru pada masing-masing sekolah terkategori *puas* demikian halnya pada aspek prosedur pengangkatan guru agama terkategori *puas*. Keberadaan guru agama pada sekolah umum sangat urgen mengingat pentingnya mata pelajaran tersebut bagi peserta didik. Mata pelajaran agama diharapkan mampu untuk membentuk peserta didik yang memiliki akhlak dan prilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan menjadi generasi penerus bangsa yang berkepribadian.

Keberadaan guru agama pada beberapa satuan pendidikan menjadi kendala besar, mengingat pengangkatan dan penempatan guru agama pada satuan pendidikan yang tidak memiliki guru tidak pernah ada. Keberadaan guru agama yang ada pada sekolah-sekolah yang ada juga terdapat beberapa guru yang memasuki masa purnabakti.

Kendala dalam hal kekurangan guru agama pada sekolah menengah ini sudah menjadi catatan bagi beberapa kepala sekolah menengah di Kota Makassar.

Penilaian Peserta Didik Terhadap Pendidikan Agama

Jumlah angket yang terjaring dari peserta didik sebanyak 162 responden, berdasarkan penilaian peserta didik tentang Pendidikan Agama di sekolah diperoleh rerata 2.87 yang terkategori *puas*. Lihat tabel 3.

Tabel 3 Penilaian Peserta Didik SMAN dan SMKN Kota Makassar

INDIKATOR	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU LAYANAN	BIAYA	SPESIFIKASI LAYANAN	KOMP LAYANAN	PRILAKU LAYANAN	MAKLUMAT LAYANAN	SARAN	RATA2	
KODE 01	SDM GURU AGAMA	3.40				3.13	2.91	3.43	2.40	2.98	
KODE 02	PENGAWAS GURU AGAMA							3.43	2.40	2.91	
KODE 03	SERTIFIKASI GURU AGAMA						2.91	3.43	2.40	2.91	
KODE 04	SARANA DAN PRASARANA	2.47			2.40			2.33	3.43	2.40	2.53
KODE 05	PROSES BELAJAR MENGAJAR	3.04	3.06	2.85	2.36	2.69	3.13	2.91	3.43	2.40	2.87
KODE 06	KURIKULUM PA					3.03	3.20	2.84	3.43	2.40	2.98
RATA2		2.85	3.06	2.85	2.20	2.86	3.15	2.78	3.43	2.40	2.87

Respon dari peserta didik terhadap pendidikan agama yang diperoleh dari sekolah pada aspek maklumat layanan terkategori *sangat puas*. Maklumat layanan merupakan aspek di mana guru pendidikan agama dalam pelajaran agama mampu meningkatkan ketakwaan peserta didik, mampu mendorong peserta didik beribadah sesuai dengan agama yang dianut, mampu memberi motivasi, memiliki kepedulian dan toleransi terhadap orang lain. Aspek kompetensi layanan yakni berkaitan dengan kompetensi guru agama juga diresponi *puas* oleh peserta didik. Demikian hal pada aspek prosedur yang menitik beratkan pada proses belajar juga direponi peserta didik dengan kategori *puas*.

Aspek pembiayaan pendidikan agama merupakan aspek yang rendah bagi peserta didik. Aspek ini oleh peserta didik diresponi dengan kategori *cukup puas* adalah pembiayaan berkaitan dengan dukungan pembiayaan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan OSIS, perawatan dan

pemeliharaan tempat ibadah, dan menghadirkan tokoh agama ke sekolah. Kegiatan-kegiatan ini pada aspek pembiayaan tidak memiliki dukungan pembiayaan. Pada kegiatan-kegiatan pengembangan tersebut oleh sekolah dianggap sebagai kegiatan yang sangat penting dan berpengaruh terhadap peserta didik. Pentingnya daya dukung pembiayaan tentunya berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penilaian Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pendidikan agama

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dari responden kepala sekolah, guru agama dan peserta didik terhadap pendidikan agama dilihat pada aspek sumber daya guru agama, pengawas guru agama, sertifikasi guru agama, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, dan kurikulum pendidikan agama secara umum terkategori *cukup puas* dengan nilai IKM 58.35. lihat tabel 4.

Tabel 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pendidikan Agama SMAN/SMKN Kota Makassar

NO	KODE ANGKET	UNSUR PELAYANAN	SDM	PENGAWAS	SERTIFIKASI	SASPRAS	PROSES	KURIKULUM	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANA
			GURU AGAMA KODE 1	GURU AGAMA KODE 2	GURU AGAMA KODE 3	KODE 4	BELAJAR MENGAJAR KODE 5	PA KODE 6	
1	KODE A	PERSYARATAN	2.67	2.00	2.99	2.32	2.40	2.95	2.55
2	KODE B	PROSEDUR	2.54	2.20	2.78	2.53	2.67	3.12	2.64
3	KODE C	WAKTU PELAYANAN	1.52	2.18	2.32	2.59	1.98	2.64	2.20
4	KODE D	BIAYA/TARIF	1.72	1.72	1.94	1.77	1.92	1.65	1.79
5	KODE E	SPEKIFIKASI PELAYANAN	2.06	2.06	2.06	2.06	2.23	1.94	2.07
6	KODE F	KOMPETENSI PELAKSANA	2.85	2.40	2.52	2.52	2.85	2.70	2.64
7	KODE G	PELAKU PELAKSANA	2.83	2.57	2.83	2.54	2.83	2.69	2.71
8	KODE H	MAKULMAT PELAYANAN	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
9	KODE I	SARAN DAN MASUKAN	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88
NILAI TIAP UNIT LAYANAN			1.26	2.15	2.41	2.28	2.34	2.43	2.33
NILAI IKM PER UNIT LAYANAN			56.62	53.72	60.05	57.03	58.41	60.77	58.35

Kategori *cukup puas* yang diperoleh sebagai nilai indeks kepuasan, tentunya menunjukkan bahwa ada beberapa hal terdapat nilai kepuasan masih pada posisi angka terkecil, nilai indeks tersebut seharusnya masih perlu peningkatan, dua

unit pelayanan yang perlu perhatian lebih dari Kementerian Agama adalah peran pengawas pendidikan agama dengan sarana dan prasarana diresponi rendah di bandingkan dengan aspek layanan lainnya.

Pengawas agama yang ditanggapi oleh sekolah adalah intesitas kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan pembinaan masih belum maksimal, termasuk sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pendidikan agama belum maksimal dirasakan oleh sekolah-sekolah.

Sementara sarana dan prasarana pendidikan agama juga menjadi nilai indeks yang terkategori rendah menjadi kendala pada sekolah, hal yang perlu perhatian dari pemerintah khususnya Kementerian Agama adalah pengadaan buku bahan ajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan sarana peribadatan berupa kitab suci dan alat ibadah menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Kategori *cukup puas* pada indeks layanan pendidikan agama di sekolah menengah di Kota Makassar menunjukkan terdapat beberapa aspek yang memerlukan layanan yang maksimal oleh Kementerian Agama. Harapan akan respon yang cepat dari Kementerian Agama terhadap saran dan masuk masih dianggap lambat dan lama. Hal ini penting mengingat pentingnya peningkatana mutu pendidikan agama di sekolah menengah.

1) IKM Terhadap Guru Agama

Hasil indeks kepuasan oleh (kepala sekolah, guru agama dan peserta didik) mengenai Pendidikan agama yang berhubungan dengan sumber daya guru agama di sekolah nilainya rerata 2,26 atau Nilai IKM perunit layanan sebesar 56.62, dari angka tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Pendidikan agama yang menyangkut pada persoalan sumber daya guru agama terkategori *cukup puas*.

Tabel 5 Nilai IKM Guru Agama
SMAN/SMKN Kota Makassar

NO	KODE ANGKET	UNSUR PELAYANAN	SDM GURU AGAMA KODE 1
1	KODE: A	PERSYARATAN	2.67
2	KODE: B	PROSEDUR	2.54
3	KODE: C	WAKTU PELAYANAN	1.52
4	KODE: D	BIAYA/TARIF	1.72
5	KODE: E	SPESIFIKASI PELAYANAN	2.06
6	KODE: F	KOMPETENSI PELAKSANA	2.85
7	KODE: G	PERILAKU PELAKSANA	2.83
8	KODE: H	MAKLUMAT PELAYANAN	2.53
9	KODE: I	SARAN DAN MASUKAN	1.88
NILAI TIAP UNIT LAYANAN			2.26
NILAI IKM PER-UNIT LAYANAN			56.62

Dari penilaian IKM peritem, menunjukkan bahwa nilai yang tertinggi adalah Kompetensi pelaksanaan dengan rerata 2.85 dan yang terendah adalah waktu layanan dengan rerata 1.52.

Indeks kepuasan terhadap kompetensi guru agama yang dinilai *cukup puas*, hal menunjukkan bahwa guru agama telah melakukan pembelajaran yang memadai. Kompetensi yang ditunjukkan guru agama dengan memiliki ilmu dan pengetahuan agama yang luas dalam pembelajaran serta perilaku guru agama dengan warga sekolah dan komunikasi dengan orang tua peserta didik diresponi *cukup puas*. Kondisi ini tentunya memerlukan peningkatan kompetensi guru agama dan intensitas komunikasi dengan warga sekolah maupun orang tua peserta didik. Antisipasi terhadap perkembangan yang mengarah kepada perilaku negatif peserta didik akan lebih mudah diantisipasi dengan meningkatkan komunikasi tentang perkembangan peserta didik kepada orang tua.

Ketersediaan sumber daya guru agama untuk Kota Makassar dewasa ini sangat terbatas. Mengingat terdapat beberapa sekolah untuk tingkat menengah yang akan memasuki masa purna bakti dan terdapat sekolah umum negeri yang belum memiliki

guru agama PNS. Keterbatasan jumlah guru agama Islam pada sekolah sangat dirasakan. Belum lagi dengan ketersediaan guru agama berdasarkan agama peserta didik. Khusus bagi peserta didik beragama Kristen dan Katolik ketersediaan tenaga guru agama sangat terbatas, apalagi peserta didik yang Bergama Hindu dan Budha. Pembelajaran pendidikan agama dilakukan di luar sekolah misalnya bagi agama Kristen, Katolik mendapatkan pembelajaran agama pada gereja dan peserta didik Hindu dan Budha masing-masing mendapatkan nilai dari pemuka agama pada rumah ibadah mereka masing-masing.

Keterbatasan sumber daya tenaga pendidik ini menuntut sekolah-sekolah untuk melakukan pengangkatan tenaga pendidik pendidikan agama pada semua agama atau paling tidak melakukan pengangkatan pada tenaga-tenaga pendidik honorer yang telah ada.

2) IKM terhadap Pengawas Guru Agama

Indeks Kepuasan Masyarakat mengenai Pendidikan agama yang berhubungan dengan Pengawas guru agama terkategori *cukup puas* dengan nilai IKM 53.72. lihat tabel 6.

Tabel 6 Nilai IKM Pengawas Guru Agama
SMAN/SMKN Kota Makassar

NO	KODE ANGKET	UNSUR PELAYANAN	PENGAWAS GURU AGAMA KODE 2
1	KODE: A	PERSYARATAN	2.00
2	KODE: B	PROSEDUR	2.20
3	KODE: C	WAKTU PELAYANAN	2.18
4	KODE: D	BIAYA/TARIF	1.72
5	KODE: E	SPESIFIKASI PELAYANAN	2.06
6	KODE: F	KOMPETENSI PELAKSANA	2.40
7	KODE: G	PERILAKU PELAKSANA	2.57
8	KODE: H	MAKLUMAT PELAYANAN	2.53
9	KODE: I	SARAN DAN MASUKAN	1.88
NILAI TIAP UNIT LAYANAN			2.15
NILAI IKM PER-UNIT LAYANAN			53.72

Pengawas pendidikan agama yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama dalam hal membina dan membimbing guru-guru memegang peran penting. Interaksi yang terjadi antara guru agama dan pengawas menjadi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah.

Kehadiran pengawas di sekolah-sekolah binaan menjadi penting sebagai bagian tugas kepengawasan. Pembinaan dan layanan yang diberikan kepada guru agama menuntut pengawas memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Respon yang ditunjukkan pada aspek ini menunjukkan bahwa indeks kepuasan pada aspek pelaksanaan kepengawasan *cukup puas*. Peningkatan kualitas kepengawasan pada sekolah-sekolah sangat diharapkan demikian juga intensitas kunjungan pada sekolah-sekolah binaan.

Timbal balik terhadap kepengawasan yang diberikan oleh pengawas berupa saran dan masukan kepada guru agama ini responi

oleh responden dengan *cukup puas* demikian sebaliknya saran dan masukan dari guru agama juga diresponi *cukup puas*. Antara pengawas dan guru agama pada sekolah-sekolah tentunya memerlukan kerjasama yang lebih intens dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama.

Keterbatasan jumlah pengawas agama pada Kementerian Agama merupakan salah satu kendala yang sangat urgen mengingkati banyaknya jumlah sekolah tingkat menengah yang ada di Kota Makassar. Belum lagi bila pengawas agama didasarkan pada masing-masing pendidikan agama misalnya pendidikan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan pendidikan agama Konghucu.

3) IKM terhadap pelaksanaan Sertifikasi

Hasil analisis terkait pendidikan agama berkaitan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru agama pada sekolah secara umum terkategori *cukup puas* dengan nilai indeks kepuasan 60.05. secara rinci lihat tabel 7.

Tabel 7 Nilai IKM Pelaksanaan Sertifikasi Guru Agama
SMAN/SMKN Kota Makassar

NO	KODE ANGKET	UNSUR PELAYANAN	SERTIFIKASI GURU AGAMA KODE 3
1	KODE: A	PERSYARATAN	2.99
2	KODE: B	PROSEDUR	2.78
3	KODE: C	WAKTU PELAYANAN	2.32
4	KODE: D	BIAYA/TARIF	1.94
5	KODE: E	SPESIFIKASI PELAYANAN	2.06
6	KODE: F	KOMPETENSI PELAKSANA	2.52
7	KODE: G	PERILAKU PELAKSANA	2.83
8	KODE: H	MAKLUMAT PELAYANAN	2.53
9	KODE: I	SARAN DAN MASUKAN	1.88
NILAI TIAP UNIT LAYANAN			2.40
NILAI IKM PER-UNIT LAYANAN			60.05

Aspek sertifikasi guru agama menunjukkan nilai indeks kepuasan *cukup puas*. Sertifikasi guru agama pada sekolah-sekolah dengan indeks kepuasan yang cukup ini menunjukkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru agama terkait prosedur pengajuan sertifikasi, kelengkapan administrasi, sampai kepada pencairan dana sertifikasi bagi guru PNS maupun Non PNS sejauh ini tidak menemukan kendala. Kelancaran akan proses sertifikasi guru agama berjalan berdasarkan ketentuan dan

peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai pihak yang berwenang membina terkait pendidikan agama.

4) IKM terhadap Sarana dan Prasarana

Hasil analisis dari keseluruhan angket yang diisi mengenai Pendidikan agama yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan agama menunjukkan kategori *cukup puas* atau nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 57.08.

Tabel 8 Nilai IKM Sarana dan Prasarana
SMAN/SMKN Kota Makassar

NO	KODE ANGKET	UNSUR PELAYANAN	SARANA DAN PRASARANA KODE 4
1	KODE: A	PERSYARATAN	2.34
2	KODE: B	PROSEDUR	2.53
3	KODE: C	WAKTU PELAYANAN	2.59
4	KODE: D	BIAYA/TARIF	1.77
5	KODE: E	SPESIFIKASI PELAYANAN	2.06
6	KODE: F	KOMPETENSI PELAKSANA	2.52
7	KODE: G	PERILAKU PELAKSANA	2.54
8	KODE: H	MAKLUMAT PELAYANAN	2.53
9	KODE: I	SARAN DAN MASUKAN	1.88
NILAI TIAP UNIT LAYANAN			2.28
NILAI IKM PER-UNIT LAYANAN			57.08

Aspek sarana dan prasarana pembelajaran agama menunjukkan nilai indeks kepuasan terkategori *cukup puas*. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran pendidikan agama pada sekolah belum memenuhi kebutuhan responden. Pembelajaran agama yang diberikan pada sekolah idealnya tidak hanya mengandalkan materi tetapi lebih dari pada

itu aspek fasilitas berkaitan sarana yang mendukung juga perlu diadakan.

Mengimbangi materi pembelajaran di kelas sarana lain yang diperlukan misalnya lembar kerja siswa, buku bahan ajar atau buku paket dan buku-buku pendukung lainnya juga sangat diperlukan dalam pembelajaran agama. Fasilitas lain yang tidak kalah pentingnya adalah sarana peribadatan dan alat beribadah bagi peserta

didik. Kebutuhan akan fasilitas ini diresponi kurang memadai oleh peserta didik.

Keterbatasan pada pembiayaan merupakan kendala yang paling mendasar yang dihadapi oleh responden. Dan pembiayaan merupakan item yang sangat rendah dan hampir semua sekolah tidak memiliki pembiayaan yang berkaitan operasionalisasi. Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak bagi kelancaran proses pembelajaran menjadi lebih sulit karena hal ini tidak didukung dengan ketersediaan

pembiayaan. Ketersediaan fasilitas berupa pengaduan dan saran sebagai media, ini juga belum tersedia sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi bagi perbaikan pendidikan agama secara umum.

5) IKM terhadap Proses Belajar Mengajar

Aspek proses belajar mengajar secara keseluruhan menunjukkan respon yang terkategori *cukup puas* dengan nilai IKM 58.41.

Tabel 9 Nilai IKM Proses Belajar Mengajar SMAN/SMKN Kota Makassar

NO	KODE ANGKET	UNSUR PELAYANAN	PROSES BELAJAR
			MENGAJAR KODE 5
1	KODE: A	PERSYARATAN	2.40
2	KODE: B	PROSEDUR	2.67
3	KODE: C	WAKTU PELAYANAN	1.93
4	KODE: D	BIAYA/TARIF	1.92
5	KODE: E	SPESIFIKASI PELAYANAN	2.23
6	KODE: F	KOMPETENSI PELAKSANA	2.85
7	KODE: G	PERILAKU PELAKSANA	2.83
8	KODE: H	MAKLUMAT PELAYANAN	2.53
9	KODE: I	SARAN DAN MASUKAN	1.88
NILAI TIAP UNIT LAYANAN			2.34
NILAI IKM PER-UNIT LAYANAN			58.41

Pada aspek proses belajar mengajar oleh responden pada item kompetensi pelaksana menunjukkan nilai IKM *cukup puas* demikian halnya pada item perilaku pelaksana. Item ini menunjukkan bahwa kompetensi guru agama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar *cukup baik*. Kompetensi yang ditunjukkan oleh guru agama baik dalam hal pengetahuan dan profesional guru agama dalam mengajar, metode pembelajaran yang digunakan, evaluasi yang digunakan kemudian cara guru agama berkomunikasi dan bersosialisasi dalam lingkungan sekolah dinilai *cukup puas*.

Kategori yang oleh responden diresponi *cukup puas* tentunya memerlukan tindakan yang khususnya oleh responden guru secara dini untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan kompetensinya,

sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat sekolah khususnya peserta didik dapat terpenuhi sesuai harapan. Keaktifan guru dalam berbagai wadah misalnya MGMP menjadi penting demikian juga keikutsertaan dalam kediklatan, workshop dan seminar-seminar. Keterlibatan dan keikutsertaan dalam wadah ini oleh sebagian responden guru agama belum menunjukkan intensitas yang memadai.

Pada aspek proses belajar mengajar item ketersediaan media pengaduan dan saran terkait aspek ini terkategori *cukup puas*. Hal ini mengindikasikan bahwa sarana ini belum maksimal tersedia oleh pihak terkait. Saran dan masukan bagi peningkatan terkait proses belajar mengajar pendidikan agama di sekolah sangat penting untuk ditindak lanjuti dan hal ini tentunya akan mengarah pada

perbaikan dan peningkatan pembelajaran pendidikan agama.

6) IKM terhadap Kurikulum Pendidikan Agama

Hasil analisis diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Pendidikan agama yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan agama menunjukkan katogeri *cukup puas* dengan nilai IKM perunit layanan 60.77.

Tabel 10 Nilai IKM Kurikulum Pendidikan Agama SMAN/SMKN Kota Makassar

NO	KODE ANGKET	UNSUR PELAYANAN	KURIKULUM PEND AGAMA KODE 6
1	KODE: A	PERSYARATAN	2.95
2	KODE: B	PROSEDUR	3.12
3	KODE: C	WAKTU PELAYANAN	2.64
4	KODE: D	BIAYA/TARIF	1.65
5	KODE: E	SPESIFIKASI PELAYANAN	1.94
6	KODE: F	KOMPETENSI PELAKSANA	2.70
7	KODE: G	PERILAKU PELAKSANA	2.69
8	KODE: H	MAKLUMAT PELAYANAN	2.53
9	KODE: I	SARAN DAN MASUKAN	1.88
NILAI TIAP UNIT LAYANAN			2.43
NILAI IKM PER-UNIT LAYANAN			60.77

Tabel 17 menunjukkan bahwa aspek prosedur mendapatkan respon tertinggi yakni 3.12. Respon respon tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah diikuti dan impelementasikan sekolah dan guru agama terutama penggunaan kurikulum K 13. Implementasi kurikulum K 13 di beberapa sekolah dilakukan secara bertahap meskipun di beberapa sekolah masih ada yang menggunakan KTSP. Penggunaan kurikulum kurikulum KTSP ini digunakan hanya untuk menyelesaikan pembelajaran yang sudah berjalan dengan menggunakan kurikulum KTSP.

Kurikulum yang dikembangkan di masing-masing sekolah tetap seragam menggunakan K13, sehingga implementasi menerapkan kurikulum diantara sekolah sudah menunjukkan keseragaman. Hal ini yang memberikan kontribusi positif terhadap pemberlakuan dan pengembangan kurikulum Pendidikan agama di sekolah.

Ketentuan akan penggunaan kurikulum K 13 oleh sebagian guru agama masih dianggap belum menunjukkan maksimalisasi. Masih terdapat kendala-kendala yang memerlukan perhatian lebih

terutama oleh Kementerian Agama. Pendidikan Agama sebagai salah satu mata pelajaran penting terutama bagi peserta didik diharapkan dapat mengantar peserta didik menjadi sosok penerus harapan bangsa. Di samping kurikulum, kompetensi guru agama juga harus dipertimbangkan terutama dalam upaya-upaya peningkatan kompetensi guru.

Nilai IKM yang sedikit rendah ditunjukkan pada aspek pembiayaan, dengan nilai rerata 1.65. Aspek pembiayaan menjadi salah satu kendala dalam operasional yang oleh guru agama dirasakan kurang maksimal. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang tersedia berkaitan operasionalisasi pembelajaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada indeks layanan pendidikan agama di sekolah menengah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Respon Kepala sekolah terhadap pendidikan agama di sekolah menengah secara umum menunjukkan kategori *cukup puas*. Dari respon kepala sekolah tersebut secara rinci pada aspek perilaku layanan

pendidikan agama berkaitan layanan yang dilakukan oleh guru agama dan pengawas agama diapresiasi *puas* oleh kepala sekolah.

Respon guru agama terhadap pendidikan agama di sekolah juga terkategori *cukup puas*. Hal ini terkait keberadaan guru agama dan persyaratan menjadi guru pada masing-masing sekolah terkategori *puas*. Aspek prosedur pengangkatan guru agama terkategori *puas*.

Respon dari peserta didik terhadap pendidikan agama serama umum terkategori *puas*. pada aspek maklumat layanan merupakan kategori *sangat puas*. Maklumat layanan merupakan aspek di mana guru pendidikan agama memberikan materi agama dan aspek pembiayaan pendidikan agama merupakan aspek yang diresponi rendah bagi peserta didik. Pembiayaan berkaitan dengan dukungan pembiayaan terhadap kegiatan keagamaan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari responden kepala sekolah, guru agama dan peserta didik terhadap pendidikan agama aspek sumber daya guru agama, pengawas guru agama, sertifikasi guru agama, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, dan kurikulum pendidikan agama secara umum terkategori *cukup puas*. Dari kategori nilai indeks kepuasan, tentunya menunjukkan terdapat beberapa hal pada posisi rerata yang dianggap rendah. Dua unit pelayanan yang perlu perhatian adalah peran pengawas pendidikan agama dengan sarana dan prasarana diresponi rendah di dibandingkan dengan aspek layanan lainnya. Selain itu sarana dan prasarana pendidikan agama juga menjadi nilai indeks yang terkategori rendah demikian halnya terhadap pengadaan buku bahan ajar, sarana peribadatan berupa kitab suci dan alat ibadah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Litbang Agama Makassar dan Redaksi Jurnal Educandum yang telah menerima dan

memuat tulisan ini. Dan kepada teman-teman peneliti, terima kasih telah memberikan saran, kritik, dan kesediaan berdiskusi selama tulisan ini dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Brata, Ate. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto, Agus (2002). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK-UGM
- Hasbullah. 2006: *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/1637-Indeks-Pendidikan-Agama-di-SMA>.
- Kompri, 2015. *Manajemen Pendidikan, Komponen-Komponen Elementer Kemajuan Sekolah*. Yogyakarta. Ar Ruzz Media
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 Tahun 2009 tentang *Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Rana, Anoop SJB. 1999. *The Sky Limit Public Services: New Approach*. FNS: Liberal Time.
- Sianipar, J.P.G. 1998. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)* Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin. 2005. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Ciputat Jakarta. Ciputat Press
- Thobroni, M. 2016. *Belajar dan Pembelajaran, Teori dan Praktek*. Cet II. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.

Rosdiana

Tjiptono, F., dan Diana, A. 2003. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Warella, Y. 1997. "*Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik*". Pidato

Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Ilmu Administrasi Negara, Universitas Diponegoro, Semarang.

Zulfah, Misbah, 2011. *Pendidikan Agama Anak suku Kalang*, Jurnal Walisongo, Volume 19 Nomor 2 Hal. 451-466